



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATKER PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

**Penyusunan
Strategi Pembangunan Permukiman
dan Infrastruktur Perkotaan**

SPPIP

Kabupaten Polewali Mandar

**Laporan Bulanan Ke 6
(2 November – 29 November 2012)**



PT. DEKAMA SEKATA

● MANAGEMENT ● PLANNING ● DESIGNING ● ENGINEERING

Kata Pengantar

Laporan Bulanan Ke- 6 ini merupakan serangkaian kegiatan dalam penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar

Laporan Bulanan Ke- 6 ini dipersiapkan oleh Konsultan **PT. Dekama Sekata** untuk **Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.**

Laporan Bulanan Ke- 6 ini berisikan laporan hasil kegiatan pada bulan Ke Enam yang dilaksanakan pada tanggal 2 November sampai dengan 29 November 2012 dalam pekerjaan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar

Akhirnya konsultan mengucapkan terima kasih atas segala saran, komentar dan masukan yang diberikan untuk laporan hasil kegiatan ini. Besar harapan konsultan untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan secara maksimal kegiatan **Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar.**

Demikian diucapkan terima kasih.

Polewali Mandar, November 2012

PT. DEKAMA SEKATA

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Sasaran	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Keluaran	5
RENCANA KERJA UMUM	6
A. Rencana Kerja	6
B. Rencana dan tahapan Teknis Pelaksanaan	8
C. Tahapan koordinasi dan konsolidasi Produk	16
D. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	17
REALISASI PEKERJAAN	24
RENCANA KERJA BULAN BERIKUTNYA	28
KESIMPULAN REALISASI PELAKSAAN PEKERJAAN	28
LAMPIRAN	

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) setidaknya dilatarbelakangi oleh 2 (dua) hal pokok, yaitu :

- ❖ Dinamika perkembangan kota/kawasan perkotaan yang menimbulkan berbagai permasalahan -khususnya di bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan- yang memerlukan penanganan yang bersifat komprehensif untuk dalam jangka panjang.
- ❖ Diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Hal lainnya yang menjadi latar belakang Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) adalah :

- a. Daya-tarik kehidupan perkotaan dan tuntutan kehidupan yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyak penduduk Indonesia yang beralih untuk tinggal dan beraktivitas di kawasan perkotaan.
- b. Kecenderungan perkembangan perkotaan ditambah dengan indikasi munculnya beberapa persoalan di wilayah perkotaan tersebut mensyaratkan adanya penanganan yang lebih terpadu dalam konteks kota dan membutuhkan kejelasan payung dalam strategi pembangunan.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, perlu adanya penekanan penyusunan strategi pengembangan kabupaten/kota pada strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang diharapkan akan menjamin terjadinya integrasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan dengan program terkait lain. Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan itu sendiri tetap didasarkan dan mengacu pada Strategi Pengembangan Kota (SPK) untuk lingkup kota atau Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan (SPKPP) untuk lingkup Kabupaten.

Terkait dengan tanggung-jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pada pasal 5 dan pasal 6 UU No. 1/2011 dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung-jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh Menteri pada tingkat nasional, Gubernur pada tingkat Provinsi; dan Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota.

Cakupan pembinaan yang dilakukan pada masing-masing tingkat dalam hal a) perencanaan; b) pengaturan; c) pengendalian; dan d) pengawasan. Selain

itu, juga ditekankan bahwa dalam melaksanakan pembinaan harus dilakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik vertikal maupun horizontal.

Salah-satu wujud dalam pembinaan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/2011 tersebut adalah dengan menyusun Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memberikan dukungan dalam bentuk bantuan dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang bersifat pendampingan dan peningkatan serta penguatan kapasitas (*capacity building*) bagi provinsi, kota/kabupaten dengan menyusun **Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten Polewali Mandar**.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

B.1. MAKSUD PENYUSUNAN SPPIP KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan maksud untuk memberikan pendampingan bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar daerah guna menghasilkan Strategi dalam Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan kabupaten dan strategi serta kebutuhan pengembangan kawasan perkotaannya.

B.2. TUJUAN PENYUSUNAN SPPIP KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tujuan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten Polewali Mandar adalah:

- 1) Membantu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam penyediaan strategi yang komprehensif untuk mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dengan menekankan kepada strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang memenuhi kaidah perencanaan dan terintegrasi dengan sistem perkotaan kabupaten, sehingga dapat menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan kawasan perkotaan dalam jangka panjang;
- 2) Memberikan pendampingan bagi perangkat perencana dan pelaksana pembangunan di daerah dalam menyusun strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan melalui proses diskusi untuk mencapai kesepakatan strategi pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan sebagai acuan pembangunan kabupaten di bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan.

C. SASARAN

a. Sasaran Fungsional

Terselenggaranya kegiatan pengembangan kawasan perkotaan melalui pembangunan permukiman dan infrastruktur yang dapat mendukung percepatan pembangunan kabupaten secara berdaya dan berhasil guna berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

b. Sasaran Operasional

- 1) Tersedianya salah-satu instrumen pengembangan wilayah kabupaten yang menitikberatkan pada pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan yang memenuhi kaidah perencanaan dan kaidah tata pemerintahan yang baik.
- 2) Terwujudnya proses pembinaan pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang terintegrasi dengan kawasan fungsional perkotaan lainnya dalam konstelasi pembangunan kabupaten.
- 3) Terwujudnya keselarasan strategi pengembangan kawasan permukiman perkotaan antara sasaran pembangunan permukiman perkotaan nasional dengan rencana pembangunan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.
- 4) Tersedianya acuan bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mengoptimalkan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang dapat mendukung dan mempercepat pembangunan kawasan perkotaan sesuai dengan karakteristik dan tujuan pembangunan kabupaten.
- 5) Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kota (*stake holders*) dalam penyediaan strategi pengembangan permukiman perkotaan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

D. RUANG LINGKUP

D.1. LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian kegiatan besar pembangunan wilayah kabupaten yang akan diselenggarakan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun. Keluaran dari kegiatan yang diselenggarakan pada tahun pertama ini akan menjadi dasar dalam proses institusionalisasi strategi yang disusun dan upaya uji terap/implementasi strategi pada suatu kawasan permukiman yang diprioritaskan penanganannya. Dalam kerangka waktu satu tahun anggaran ini, lingkup kegiatan ini ditekankan kepada penyusunan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, dengan infrastruktur perkotaan yang dibatasi pada infrastruktur keciptakarya dalam lingkup kawasan permukiman perkotaan di wilayah kabupaten.

Pelaksanaan kegiatan SPPIP dilakukan dengan rangkaian 5 tahapan utama, yaitu :

- 1) Tahap Persiapan
- 2) Tahap Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan
- 3) Tahap Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
- 4) Tahap Perumusan Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
- 5) Tahap Finalisasi dan Sosialisasi

D.2. LINGKUP WILAYAH KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten Polewali Mandar dilakukan terhadap keseluruhan wilayah Kabupaten Polewali Mandar, khususnya pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Permukiman Perkotaan dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar.



PETA ADMINISTRASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

E. KELUARAN

Keluaran yang ditetapkan dalam kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten Polewali Mandar meliputi : (1) Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP); dan (2) Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan dengan rincian muatan sebagai berikut :

(1) Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

Muatan dokumen :

- a. Indikasi arah pengembangan kota serta pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan;
- b. Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas;
- c. Identifikasi Kawasan Permukiman Prioritas;
- d. Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;
- e. Rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;
- f. Analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skema manajemen pembangunan perkotaan;
- g. Analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi dan identifikasi dampak program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;
- h. Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (dalam skala kawasan permukiman perkotaan);
- i. Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;
- j. Dokumen spasial terkait dengan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

(2) Dokumen Penyelenggaraan (*Proceeding*) Kegiatan

Muatan dokumen :

- a. Notulensi dari tiap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyepakatan dan diseminasi;
- b. Absensi dan daftar hadir tiap penyelenggaraan kegiatan penyepakatan dan diseminasi;
- c. Materi yang disampaikan;
- d. Bentuk-bentuk kesepakatan yang dihasilkan;
- e. Proses diskusi.

Rencana Kerja Umum

A. RENCANA KERJA

Jangka waktu yang diperlukan untuk kegiatan Pendampingan Penyusunan SPPIP Kabupaten Polewali Mandar menurut kerangka acuan pekerjaan adalah 7 bulan kalender kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dalam kurun waktu pelaksanaan tersebut diperlukan tahapan pekerjaan secara umum yang secara garis besar akan terbagi sebagai berikut :

1. Tahap Pra Pelaksana Kegiatan

Tahap pra pelaksana kegiatan ini adalah tahap awal sebelum rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana SPPIP dilakukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan kegiatan kepada penerima bantuan teknis dan tahap persiapan untuk pelaksanaan kegiatan. Terdapat empat kegiatan besar pada tahap ini, yaitu :

A. Sosialisasi Rencana Kerja Teknis Kepada Satker

Sosialisasi kepada satker ini merupakan kegiatan awal dari rangkaian kegiatan pada tahap pelaksanaan kegiatan yang intinya adalah mengenalkan keberadaan kegiatan ini kepada satker pelaksana yang terdapat diprovinsi.

B. Sosialisasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Sosialisasi Kepada Pemerintah Daerah ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sosialisasi kepada satker yang intinya adalah mengenalkan keberadaan kegiatan ini kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Pokjanis SPPIP yang akan menyelenggarakan penyusunan SPPIP melalui kegiatan ini.

2. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Penyempurnaan acuan kerja yang disepakati bersama dengan Satker dan Pokja Provinsi.
- b. Identifikasi materi teknis beserta acuan dan pedoman

- c. Perumusan metodologi sesuai dengan kondisi teknis di lapangan
3. Pengumpulan data dan analisis penyusunan SPPIP;
 - a. Pengumpulan peraturan yang terkait
 - b. Inventarisasi hasil studi terkait :
 - RTRW Kabupaten Polewali Mandar
 - RPJP dan RPJM Kabupaten Polewali Mandar
 - RPIJM Kabupaten Polewali Mandar
 - Dokumen Renstra
 - Dokumen Keciptakarya dan permukiman
 - c. Pengamatan daerah studi berdasar pada kesepakatan Pokjanis terkait dengan jumlah kota dan besaran kawasan didalam lingkup Kabupaten.
 - d. Kajian permukiman berdasar materi teknis berdasar referensi dan pedoman SPPIP
 - e. Analisis penyusunan materi SPPIP
 - f. Perumusan dan penyusunan hasil analisis :
 - i. Spasial
 - ii. Permukiman
4. Sosialisasi dan FGD
5. Diseminasi
6. Kolokium
7. Konsultasi Publik
8. Penyusunan produk teknis
Pembahasan dan pelaporan Progress akhir

B. RENCANA DAN TAHAPAN TEKNIS PEKERJAAN

Semua data yang terkait permukiman seperti aspek kependudukan, sosial, ekonomi, budaya, fisik dan lingkungan akan dikumpulkan untuk memperoleh informasi karakteristik secara komprehensif. Sedangkan secara spesifik, akan dikumpulkan data yang terkait dengan kondisi dan permasalahan kawasan perencanaan tertentu semisal kawasan yang dipilih oleh Pokjanis sebagai kawasan-kawasan permukiman prioritas. Kualifikasi data yang dikumpulkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Pengelompokan data yang akan dikumpulkan dapat diuraikan sebagai berikut;

a. Data Fisik dan Daya Dukung Lingkungan

- Geografis
- Topografi
- Geologi
- Hidrologi
- Klimatologi
- Penggunaan Lahan
- Pola Lahan
- Kondisi pelayanan sarana dan prasarana
- Kondisi utilitas
- Kondisi Bangunan
- Obyek-objek penting yang berpengaruh dalam perkembangan permukiman seperti industri, perdagangan, pasar, pariwisata dll.

b. Data Sosial Budaya

- Perkembangan dan Komposisi Jumlah Penduduk
- Distribusi dan Kepadatan Penduduk
- Karakteristik Sosial Budaya setempat

c. Data Perekonomian

- Struktur ekonomi
- Pertumbuhan Ekonomi
- Perkembangan Aktifitas-aktifitas Ekonomi
- Kegiatan Industri, Perdagangan dan Jasa

- Sarana Kegiatan Industri, Perdagangan dan Jasa

d. Data Sarana dan Prasarana

- Air Bersih
- Drainase
- Persampahan
- Pasar
- Utilitas [Listrik, Telepon dan Gas]
- Jalan

Diperkirakan data yang dibutuhkan akan diperoleh dari berbagai sumber, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Data sekunder akan dikumpulkan dari Kantor BPS, BAPPEDA dan Dinas teknis terkait. Sedangkan data primer akan dikumpulkan langsung dari observasi lapangan dan hasil wawancara dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan inventarisasi data yang akan dikumpulkan, sumber-sumber data tersebut antara lain adalah :

a. Di Lingkungan Pemerintah daerah adalah instansi yang menangani dan mengelola bidang-bidang sebagai berikut ;

- Perencanaan Pembangunan
- Penataan Ruang Kota dan Perizinan
- Pendataan dan Statistik
- Industri, Jasa dan Perdagangan
- Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Lingkungan
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- Perumahan dan Permukiman
- Pariwisata
- Transportasi, Lalu-lintas, Angkutan Jalan Raya dan Pengelolaan Parkir
- Pengairan, Irigasi dan Pengelolaan Sumberdaya Air
- Pertanian
- Bidang-bidang terkait lainnya

b. Di Lingkungan Masyarakat

- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Pemerhati masalah perkotaan

- Tokoh Masyarakat
- Masyarakat Umum

c. Di Lingkungan Pemerintah Pusat

- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
- Instansi lainnya

Rencana Proses Kegiatan Teknis SPPIP

(1) Peningkatan kapasitas penyusunan SPPIP

- Melakukan sosialisasi program penyusunan SPPIP kepada pemangku kepentingan daerah terkait kedudukan dan fungsi SPPIP dalam strategi pengembangan kota.
- Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pertama dalam rangka persiapan dan pemantapan rencana kerja penyusunan SPPIP.
- Menyelenggarakan pelatihan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang proses penyusunan SPPIP yang dilakukan di tingkat Kota/Kabupaten. Pelatihan ini ditujukan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) dari pemerintah daerah atau yang telah ditetapkan sebagai Pokjanis Daerah untuk penyusunan SPPIP dan bagi tim pendamping penyusunan.
- Mengikuti kegiatan kolokium yang diadakan oleh DJCK untuk proses penyamaan pemahaman, target capaian, dan metoda penyusunan yang dilakukan oleh tiap kota/kabupaten yang menyusun.

(2) Identifikasi persoalan dan potensi pengembangan

- Melakukan survey primer dan sekunder untuk mendapatkan data dan informasi terkait permasalahan, kebijakan, strategi, dan program pengembangan kota serta data dan informasi pendukung analisa dan penyusunan SPPIP.
- Menyiapkan peta dasar dengan kedalaman informasi skala 1 : 25.000 yang akan digunakan sebagai peta dasar untuk melakukan identifikasi kebijakan

dan Strategi Pengembangan Kota, melakukan analisa serta menuangkan strategi pengembangan kota dan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) ke dalam bentuk spasial.

- Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi, permasalahan dan isu terkait serta kebutuhan pengembangan perkotaan dan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan, serta menetapkan permasalahan dan isu strategis permukiman perkotaan. Dalam proses identifikasi ini dilakukan berdasarkan pemetaan dasar spasial, data sekunder, pengamatan lapangan, dan wawancara kepada stakeholder inti, serta disajikan di atas peta.

(3) Analisa kebutuhan pengembangan

- Melakukan kajian/kaji ulang (review) terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah. Apabila telah tersedia Strategi Pengembangan Kota (SPK) atau dokumen sejenis lainnya, maka kajian dilakukan terhadap dokumen SPK tersebut, sedangkan apabila belum tersedia SPK ataupun dokumen sejenis lainnya, maka kajian dilakukan terhadap semua dokumen kebijakan, strategi, dan program yang telah dimiliki dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah (RPJP, RPJM, Renstra Dinas, RTRW, dan sebagainya).
- Melakukan identifikasi permasalahan dan kajian keselarasan terhadap kebijakan, strategi dan program pengembangan yang terdapat di dalam rencana pembangunan (development plan) dan rencana penataan ruang (spatial plan).
- Identifikasi dan perumusan strategi pengembangan kota dengan penekanan pada potensi dan persoalan bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan.
- Melakukan pendataan dan identifikasi sebaran permukiman, dan analisa permasalahan dan pengembangan permukiman dan infrastruktur pendukungnya.
- Perumusan kriteria dan indikator kawasan prioritas pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Adapun dalam perumusan kriteria dan indikator kawasan prioritas didasarkan pada beberapa karakteristik sebagai berikut:
 - Memiliki urgencitas Penanganan
 - Memiliki kontribusi dalam penanganan permasalahan kota

- Memiliki kontribusi dalam stimulasi pembangunan dan pengembangan kota
- Sesuai kebijakan pembangunan dan pengembangan kota
- Memiliki dominasi permasalahan terkait Bidang Keciptakarya
- Memiliki dominasi penanganan melalui bidang keciptakarya
- Identifikasi indikasi kawasan prioritas pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang akan digunakan sebagai acuan oleh daerah dalam menyusun kegiatan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKP). Adapun kawasan prioritas ini sangat unik untuk setiap kota dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan pemangku kepentingan serta disesuaikan dengan karakter kota.
- Melakukan identifikasi, analisa dan perumusan kebutuhan strategis pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan dalam konstelasi pengembangan kota.
- Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) kedua dalam rangka perumusan dan pemetaan potensi, permasalahan, dan kebutuhan pengembangan kota, serta perumusan strategi pengembangan kota.

(4) Perumusan visi, misi, dan strategi pengembangan

- Penyusunan dan perumusan visi dan misi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan
- Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) ketiga dalam proses penyusunan dan perumusan visi dan misi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan
- Penyelenggaraan konsultasi publik untuk perumusan visi dan misi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Dalam penyelenggaraan konsultasi publik ini, Pokjanis Daerah akan didampingi oleh konsultan pendamping dalam proses persiapan dan pelaksanaannya.
- Perumusan strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan
- Identifikasi implikasi dampak strategi pengembangan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
- Identifikasi dan analisa korelasi strategi pengembangan permukiman dan kebutuhan infrastruktur pendukung dalam skema manajemen pembangunan perkotaan dan rencana pembiayaannya.

- Perumusan kebutuhan program strategis yang mengacu pada strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur yang telah disusun.
- Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) keempat dalam rangka perumusan strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan serta perumusan program strategis.
- Mengikuti kegiatan kolokium yang diadakan oleh DJCK untuk proses penyamaan kedalaman substansi dari strategi dan program strategis yang dihasilkan.
- Penyelenggaraan konsultasi publik untuk perumusan strategi pengembangan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, serta kebutuhan program strategis. Dalam penyelenggaraan konsultasi publik ini Pokjanis Daerah akan didampingi oleh konsultan pendamping dalam proses persiapan dan pelaksanaannya.
- Mendukung pengadaan basis data sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja program yang saat ini sedang dikembangkan oleh DJCK.

(5) Sosialisasi SPPIP

- Melakukan sosialisasi hasil kesepakatan perumusan SPPIP melalui diseminasi kepada dinas/instansi terkait di daerah.
- Menyusun materi visualisasi hasil studi yang akan digunakan untuk kebutuhan sosialisasi dalam bentuk poster dan leaflet.

Formulasi Kegiatan Analisis

Di dalam tahap pengolahan dan analisis data akan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengolahan dan Analisis Data Primer.
- b) Pengolahan dan Analisis Data Sekunder.
- c) Penentuan Batas wilayah Perencanaan berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten polewali madar, terutama terkait dengan limngkup perkotaan.
- d) Analisis Model Pengembangan Kawasan Permukiman di kawasan-kawasan strategis terpilih.

Analisa Makro

Analisa makro ini mencakup kajian terhadap kemampuan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman, akan meliputi kajian terhadap kedudukan terhadap wilayahbelakang dan analisa pengaruh kebijaksanaan sektoral dan regional, meliputi :

1. *Analisa Kemampuan Tumbuh dan Berkembang Kawasan*

Analisa kemampuan tumbuh dan berkembang suatu kawasan tergantung pada beberapa aspek :

- a. Potensi dan permasalahan yang dimiliki, sehingga terdapat gambaran hubungan atau ketergantungan antar kawasan perencanaan dengan wilayah sekitarnya.
- b. Pengaruh potensi dan permasalahan tersebut terhadap perkembangan sektor-sektor kegiatan di kawasan yang direncanakan, pada saat ini dan masa yang akan datang, sehingga didapatkan gambaran hubungan atau ketergantungan antar sektor.

2. *Analisa Kedudukan kawasan dalam Keseimbangan Perkembangan*

- a. Kedudukan kawasan yang direncanakan
- b. Perkembangan sektor-sektor kegiatan.

3. *Analisa Pengaruh Kebijaksanaan sektoral dan Regional*

- a. pengaruh kebijaksanaan sektoral terhadap perkembangan permukiman dan perkotaan.
- b. Pengaruh kebijaksanaan terhadap sektor-sektor kegiatan di kawasan yang direncanakan

Analisa Mikro

Analisa Kependudukan, meliputi :

- Jumlah dan penyebaran penduduk
- Kecenderungan pertumbuhan penduduk
- Komposisi penduduk menurut kelompok umum, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama, lapangan kerja, pendapatan dan lainnya.

- Perkembangan penduduk dalam hal jumlah, penyebaran dan komposisi.
- Adat istiadat dan budaya, dll-nya.

Analisa Perekonomian, meliputi :

- Kecenderungan perkembangan tiap sektor kegiatan ekonomi dalam hal kapasitas investasi, penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan sifat-sifat kegiatan (khususnya kegiatan jasa perdagangan)
- Karakteristik kelembagaan bidang usaha yang ada
- Perkiraan di masa datang mengenai kapasitas investasi, kapasitas penyerapan tenaga kerja.

Evaluasi dan Perumusan Struktur dan Pola Permukiman

Tahap ini merupakan suatu kajian terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang diatasnya, yang meliputi :

- Tinjauan fungsi wilayah dan kawasan khususnya permukiman
- Penentuan strategi dasar pengembangan permukiman mengacu pada Propeda dan Renstra yang telah disusun
- Penentuan kebijaksanaan kependudukan yang memberi arahan perkembangan kuantitas, kualitas dan kepadatan permukiman
- Penentuan kebijaksanaan pengembangan tata ruang yang memberi arahan pada ekstensifikasi dan intensifikasi penggunaan ruang kawasan
- Penentuan kebijaksanaan permukiman perkotaan
- Penentuan pengembangan sarana dan prasarana permukiman perkotaan.

Identifikasi Kapasitas Pengembangan dan Kebutuhan Ruang Permukiman

1. Penggunaan Lahan

2. Jaringan Jalan

- Fungsi setiap jalan, mulai dari jalan arteri, hingga jalan setapak
- Wewenang pengelolaan jalan baik jalan negara, propinsi, jalan kota dan lingkungan
- Kondisi jalan menyangkut lebar, panjang, perkerasan, kemampuannya.

- Mengenal arus lalu lintas, arus pergerakan orang, tempat parkir dan daya tampung jalan.

3. Jaringan Utilitas

- Jaringan listrik
- Jaringan telepon
- Jaringan air minum
- Jaringan air limbah
- Sistem pembuangan sampah
- Drainase

4. Penduduk

Jumlah penduduk, struktur/komposisi penduduk, kepadatan penduduk, pertumbuhan dan perkembangan penduduk, dan lainnya-nya

C. TAHAPAN KOORDINASI DAN KONSOLIDASI PRODUK

Koordinasi dan konsolidasi yang dimaksud meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kolokium yang diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya. Tim teknis SPPIP (Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar) akan menghadiri acara tersebut sebagai pembekalan dan penyampaian progress program SPPIP.
- 2) Kunjungan survey dan obsevasi untuk pengumpulan data informasi.
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) sebanyak 4 (empat) untuk masing-masing FGD dengan rincian :
 - a. FGD 1 : Tahap pendahuluan, terkait potensi dan permasalahan
 - b. FGD 2 : Tahap interim, memperkenalkan hasil-hasil penelusuran data dan proses analisis
 - c. FGD 3 : Tahap penyusunan startegi dan penetapan kawasan prioritas terpilih
 - d. FGD 4 : Tahap Rumusan produk SPPIP
- 4) Fasilitasi penyelenggaraan diseminasi

- 5) Fasilitasi penyelenggaraan konsultasi public
- 6) Fasilitas penyelenggaraan pembahasan laporan dan produk akhir.

D. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dipersiapkan dengan mempertimbangkan efektifitas waktu efisiensi sumber daya (TA dan biaya). *Timeline* untuk setiap kegiatan dibuat sedemikian rupa agar tidak tumpang tindih (*overlapping*) satu terhadap kegiatan lainnya. Penjadwalan terhadap rincian progress-progres penting yang dipersyaratkan dalam KAK akan menempati durasi waktu yang mencukupi dengan tetap memperhatikan konsistensi pencapaian program secara keseluruhan.

Susunan progress kerja SPPIP Kabupaten Polewali mandar terdiri dari :

1. Tahap Persiapan dan Konsolidasi
2. Tahap Pendataan
3. Tahap Sosialisasi Awal
4. Tahap Peningkatan kapasitas penyusunan SPPIP
 - a. Melakukan sosialisasi program penyusunan SPPIP kepada pemangku kepentingan daerah terkait kedudukan dan fungsi SPPIP dalam strategi pengembangan kota.
 - b. Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pertama dalam rangka persiapan dan pematapan rencana kerja penyusunan SPPIP. FGD ini dilakukan bersama-sama antara pihak ketiga yang menjadi penyedia jasa (konsultan) dengan Pokjanis Daerah.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang proses penyusunan SPPIP. Pelatihan ini ditujukan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) dari pemerintah daerah atau yang telah ditetapkan sebagai Pokjanis Daerah untuk penyusunan SPPIP dan bagi tim pendamping penyusunan.
 - d. Mengikuti kegiatan kolokium yang diadakan oleh DJCK untuk proses penyamaan pemahaman, target capaian, dan metoda penyusunan yang dilakukan oleh tiap kota/kabupaten yang menyusun.

5. Tahap Penyusunan Identifikasi persoalan dan potensi pengembangan
 - a. Melakukan survey primer dan sekunder untuk mendapatkan data dan informasi terkait permasalahan, kebijakan, strategi, dan program pengembangan kota serta data dan informasi pendukung analisa dan penyusunan SPPIP.
 - b. Menyiapkan peta dasar dengan kedalaman informasi skala 1 : 25.000 yang akan digunakan sebagai peta dasar untuk melakukan identifikasi kebijakan dan Strategi Pengembangan Kota, melakukan analisa serta menuangkan strategi pengembangan kota dan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) ke dalam bentuk spasial.
 - c. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi, permasalahan dan isu terkait serta kebutuhan pengembangan perkotaan dan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan, serta menetapkan permasalahan dan isu strategis permukiman perkotaan. Dalam proses identifikasi ini dilakukan berdasarkan pemetaan dasar spasial, data sekunder, pengamatan lapangan, dan wawancara kepada stakeholder inti, serta disajikan di atas peta.

6. Tahap Penyusunan Analisa kebutuhan pengembangan
 - a. Melakukan kajian/kaji ulang (*review*) terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah. Apabila telah tersedia Strategi Pengembangan Kota (SPK) atau dokumen sejenis lainnya, maka kajian dilakukan terhadap dokumen SPK tersebut, sedangkan apabila belum tersedia SPK ataupun dokumen sejenis lainnya, maka kajian dilakukan terhadap semua dokumen kebijakan, strategi, dan program yang telah dimiliki dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah (RPJP, RPJM, Renstra Dinas, RTRW, dan sebagainya).
 - b. Melakukan identifikasi permasalahan dan kajian keselarasan terhadap kebijakan, strategi dan program pengembangan yang terdapat di dalam rencana pembangunan (*development plan*) dan rencana penataan ruang (*spatial plan*).

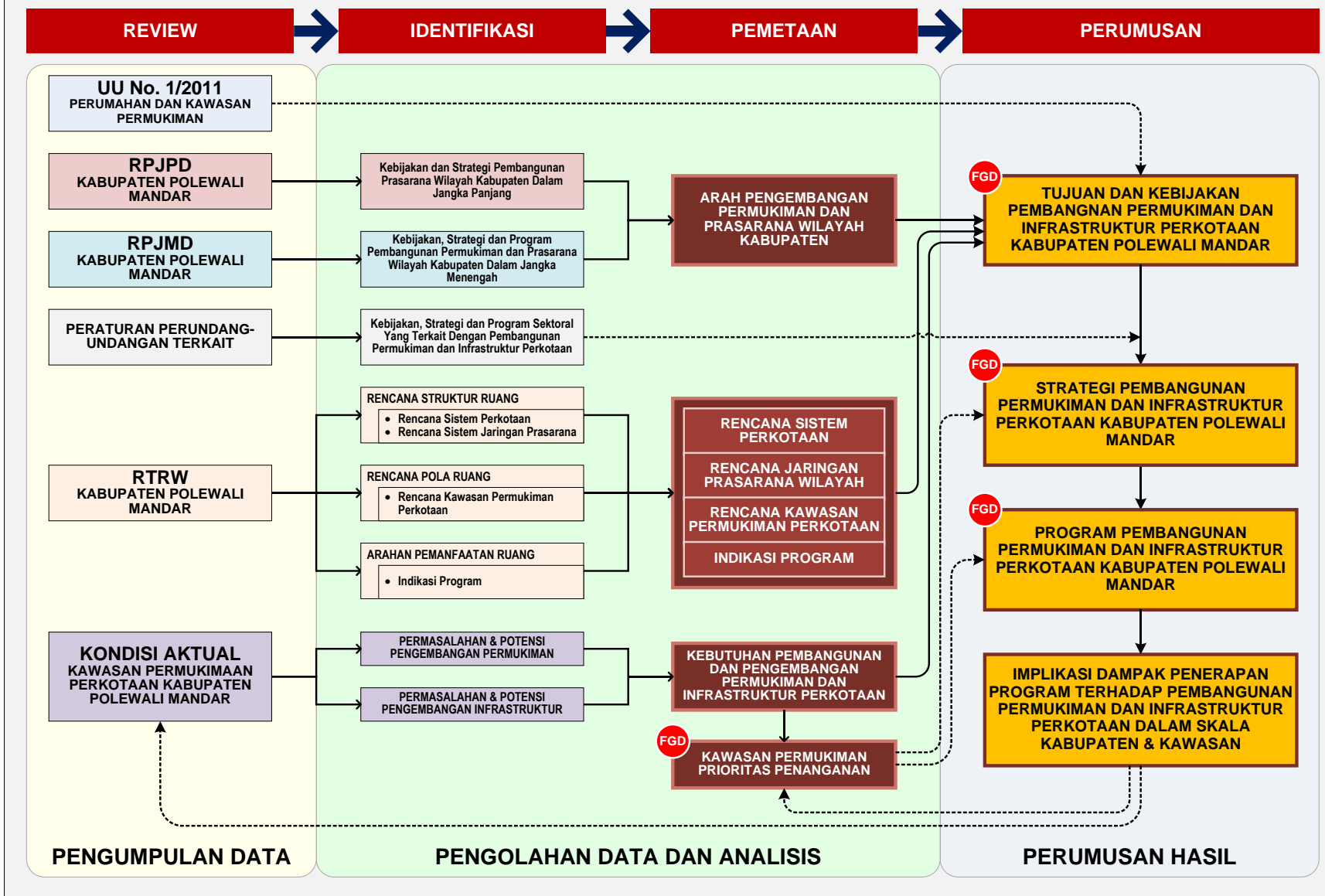
- c. Identifikasi dan perumusan strategi pengembangan kota dengan penekanan pada potensi dan persoalan bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan.
 - d. Melakukan pendataan dan identifikasi sebaran permukiman, dan analisa permasalahan dan pengembangan permukiman dan infrastruktur pendukungnya.
7. Tahap Penyusunan dan Perumusan kriteria dan indikator kawasan prioritas pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Adapun dalam perumusan kriteria dan indikator kawasan prioritas didasarkan pada beberapa karakteristik sebagai berikut:
 - a. Memiliki urgencitas Penanganan
 - b. Memiliki kontribusi dalam penanganan permasalahan kota
 - c. Memiliki kontribusi dalam stimulasi pembangunan dan pengembangan kota
 - d. Sesuai kebijakan pembangunan dan pengembangan kota
 - e. Memiliki dominasi permasalahan terkait Bidang Keciaptakaryaan
 - f. Memiliki dominasi penanganan melalui bidang keciaptakaryaan
 - g. Identifikasi indikasi kawasan prioritas pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang akan digunakan sebagai acuan oleh daerah dalam menyusun kegiatan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP). Adapun kawasan prioritas ini sangat unik untuk setiap kota dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan pemangku kepentingan serta disesuaikan dengan karakter kota.
8. Tahap Penyusunan identifikasi, analisa dan perumusan kebutuhan strategis pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan dalam konstelasi pengembangan kota.
 - a. Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) kedua dalam rangka perumusan dan pemetaan potensi, permasalahan, dan kebutuhan pengembangan kota, serta perumusan strategi pengembangan kota.
 - b. Perumusan visi, misi, dan strategi pengembangan

- c. Penyusunan dan perumusan visi dan misi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan
- d. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) ketiga dalam proses penyusunan dan perumusan visi dan misi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan
- e. Penyelenggaraan konsultasi publik untuk perumusan visi dan misi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Dalam penyelenggaraan konsultasi publik ini, Pokjanis Daerah akan didampingi oleh konsultan pendamping dalam proses persiapan dan pelaksanaannya.
- f. Perumusan strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan
- g. Identifikasi implikasi dampak strategi pengembangan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
- h. Identifikasi dan analisa korelasi strategi pengembangan permukiman dan kebutuhan infrastruktur pendukung dalam skema manajemen pembangunan perkotaan dan rencana pembiayaannya.
- i. Perumusan kebutuhan program strategis yang mengacu pada strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur yang telah disusun.
- j. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) keempat dalam rangka perumusan strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan serta perumusan program strategis.
- k. Mengikuti kegiatan kolokium yang diadakan oleh DJCK untuk proses penyamaan kedalaman substansi dari strategi dan program strategis yang dihasilkan.
- l. Penyelenggaraan konsultasi publik untuk perumusan strategi pengembangan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, serta kebutuhan program strategis. Dalam penyelenggaraan konsultasi publik ini Pokjanis Daerah akan didampingi oleh konsultan pendamping dalam proses persiapan dan pelaksanaannya.
- m. Mendukung pengadaan basis data sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja program yang saat ini sedang dikembangkan oleh DJCK.

- n. Sosialisasi SPPIP
- o. Melakukan sosialisasi hasil kesepakatan perumusan SPPIP melalui diseminasi kepada dinas/instansi terkait di daerah.
- p. Menyusun materi visualisasi hasil studi yang akan digunakan untuk kebutuhan sosialisasi dalam bentuk poster dan leaflet.

Gambar : 4.1.

**KERANGKA BERPIKIR
PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
(SPPIP) KABUPATEN POLEWALI MANDAR**





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
 SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI BARAT

Tabel : 4.1.
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	LAMA PELAKSANAAN	JADWAL PELAKSANAAN																												
			Juni 2012				Juli 2012				Agustus 2012				September 2012				Oktober 2012				November 2012				Desember 2012				
			1-7	8-14	15-21	22-28	29-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-30	31-6	7-13	14-20	21-27	28-4	5-11	12-18	19-25	26-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-6	7-13	14-21
1.	TAHAP PERSIAPAN																														
1.1.	Sosialisasi	1 hari																													
1.2.	Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja	2 minggu																													
2.	TAHAP IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN																														
2.1.	Kajian Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar	2 minggu																													
2.2.	Perumusan Indikasi Arah Pengembangan dan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar	2 minggu																													
2.3.	Kajian Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar	2 minggu																													
2.4.	Kajian Potensi, Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar	3 minggu																													
3.	TAHAP PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN																														
3.1.	Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar	1 minggu																													
3.2.	Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Prioritas	2 minggu																													
3.3.	Indikasi Kawasan Permukiman Prioritas di Kabupaten Polewali Mandar	2 minggu																													
4.	TAHAP PERUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN																														
4.1.	Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar	3 minggu																													
4.2.	Identifikasi dan Analisis Korelasi Strategi Dalam Skala Manajemen Pembangunan Kawasan Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar	2 minggu																													
4.3.	Analisis Implikasi Penerapan Strategi terhadap Pembangunan Kawasan Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar	2 minggu																													
4.4.	Perumusan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Dalam Skala Kawasan Sebagai Arahkan Kebutuhan Program Investasi Kabupaten Polewali Mandar	3 minggu																													
4.5.	Analisis Dampak Penerapan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Dalam Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar	2 minggu																													
5.	TAHAP FINALISASI DAN SOSIALISASI																														
5.1.	Penyempurnaan Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Dalam Skala Kawasan	9 minggu																													
5.2.	Penyusunan Materi Visualisasi Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten Polewali Mandar	6 minggu																													
6.	DISKUSI																														
6.1.	Sosialisasi & Konsolidasi Tingkat Provinsi	1 hari																													
6.2.	Focus Group Discussion (FGD)-1	1 hari																													
6.3.	Focus Group Discussion (FGD)-2	1 hari																													
6.4.	Focus Group Discussion (FGD)-3	1 hari																													
6.5.	Focus Group Discussion (FGD)-4	1 hari																													
6.6.	Pra FGD dan Asistensi	1 hari																													
6.7.	Kolokium	2 hari																													
6.8.	Konsultasi Publik	1 hari																													
6.9.	Diseminasi	1 hari																													
7.	PELAPORAN																														
7.1.	Laporan Pendahuluan	4 minggu																													
7.2.	Laporan Interim	9 minggu																													
7.3.	Draft Laporan Akhir	8 minggu																													
7.4.	Laporan Akhir	7 minggu																													
7.5.	Prosiding	3 minggu																													
7.6.	Laporan Bulanan	1 minggu																													

F1 FGD-1
 F2 FGD-2
 F3 FGD-3
 F4 FGD-4

SP Sosialisasi di Provinsi
 KL Kolokium
 KP Konsultasi Publik
 DS Diseminasi

L Laporan Pendahuluan
 L Laporan Interim
 L Draft Laporan Akhir
 L Laporan Akhir

Ls Prosiding
 Bs Laporan Bulan ke-n

Direktur
 PT Dekarna Seketa

Mengetahui,
 Ketua Tim Tenaga Ahli
 Penyusunan SPPIP Kabupaten Polewali Mandar

Kepala Satuan Kerja
 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat

Menyetujui,
 Pokjanis
 Penyusunan SPPIP Kabupaten Polewali Mandar

Realisasi Pekerjaan

Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun dan telah disepakati antara Satker Provinsi Sulawesi barat, Pokjanis Kabupaten Polewali Mandar dan Juga konsultan pendamping Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan, pada bulan Ke Enam (Ke-6) pelaksanaan kegiatan SPPIP Kegiatan tersebut adalah

PENYEMPURNAAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

- a. Melakukan diskusi penyempurnaan Perumusan indikasi Program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
- b. Analisa dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dalam pembangunan kab. Polewali Mandar.
- c. Persiapan bahan penyusunan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrasturktur perkotaan Kab Polewali Mandar sebagai bahan kolokium
- d. Pelaksanaan kegiatan kolokium

Dari beberapa kegiatan tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi pada bulan ini dan dilaksanakan pada bulan berikutnya. Tidak terealisasinya kegiatan tersebut disebabkan beberapa permasalahan teknis dan non teknis. Dibawah ini penjelasan konsultan tentang realisasi pekerjaan beserta hambatan dan tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan SPPIP Kabupaten polewali Mandar

Tabel
Realisasi, Hambatan, Tantangan dan Output Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan	Kegiatan	Realisasi	Rincian Kegiatan	Hambatan	Tantangan	Output Kegiatan
1	Penyempurnaan Strategi dan Program pembangunan permukiman dan Infrastruktur perkotaan	Penyempurnaan penerapan Dampak program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan	Minggu Ke 1	Penyempurnaan Strategi dan Program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan	Tidak ada	Tidak ada	Matriks program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
2.	Tahap Koordinasi dengan Pusat	Kegiatan Kolokium	Minggu Ke 2	Pelaksanaan Kolokium	Tidak Ada	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi pelaksanaan Kegiatan • Proceeding kegiatan
3.	Tahap Finalisasi	Penyempurnaan penerapan Dampak Strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan	Minggu Ke 3	Penyempurnaan penerapan Dampak Strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan	Tidak Ada	Tidak Ada	Matriks program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
		Penyiapan bahan dan Materi Konsultasi Publik	Minggu Ke 4	Penyusunan materi visualisasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Bahan dan Materi Konsultasi Publik

Rencana Kerja Bulan Berikutnya

Rencana kerja bulan berikutnya disesuaikan dengan rencana kerja yang telah disusun, dan juga melaksanakan kegiatan yang belum dapat terealisasi pada bulan Sebelumnya. Adapun rencana kerja pada bulan ke-7 adalah

1. Melakukan Penyempurnaan dan memperbaiki kekurangan dalam penyusunan Strategi dan Program pembangunan permukiman dan infrastuktur perkotaan
2. Melakukan konsultasi publik
3. Melakukan penyempurnaan Strategi dan Program pembangunan permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dalam skala kawasan sebagai arahan kebutuhan program kabupaten polewali mandar.
4. Penyusunan materi visualisasi
5. Melakukan Diseminasi

Kesimpulan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan

Pada bulan Keenam ini, dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur perkotaan membuat beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Rencana kerja bulan ini Melakukan perbaikan Perumusan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
- b. Penyempurnaan penyusunan Program permbangunan permukiman dan infastruktur perkotaan
- c. Melakukan Kolokium yang diadakan di Bandung
- d. Komunikasi antara konsultan dengan Pokjanis dan Satker terlaksana sangat baik, baik secara langsung maupun melalui telepon ataupun email